

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG)

Oleh :

Septia Yolanda

Pembimbing : Taufeni Taufik dan Eka Haryani

Faculty of Economics and Business, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email: septiayolanda@yahoo.com

Effect Of Regional Financial Accounting System, Regional Financial Statements Presentation And Accessibility of Regional Financial Statements On Accountability Of Regional Financial Management With Government Internal Control System As Moderating Variable (Empirical Study On Regional Device Organization Sijunjung Regency)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of effectof regional financial accounting system, regional financial statements presentationand accessibility of regional financial statementson accountability of regional financial management with government internal control system as moderating variable in OPD Sijunjung Regency. The data used in this study is the primary data. The population in this research is all OPD officer of Sijunjung Regency. The sample in this study were 93 people selected by using purposive sampling method. The analysis in this study was conducted using WarpPLS 5.0. The results of this study indicate that the regional financial accounting system and accessibility of regional financial statements affect the accountability of regional financial management while the regional financial statements presentation do not affect the accountability of regional financial management. The government's internal control system moderates the relationship between the regional financial accounting system and the accountability of regional financial management. However, the government's internal control system does not moderate the relationship between regional financial statements presentation and the accessibility of regional financial statements to the accountability of regional financial management.

Keywords : Regional Financial Accounting System, Regional Financial Statements Presentation, AccessibilityOf Regional Financial Statements, Accountability Of Regional Financial Management, Government Internal Control System.

PENDAHULUAN

Isu di Indonesia yang semakin mendapat perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir adalah akuntabilitas keuangan publik. Hal tersebut disebabkan karena adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Fauziyah, 2017).

Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Sumarsono, 2009).

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diganti menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara atau daerah (www.bpk.go.id).

Dengan adanya otonomi daerah dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka sangat dibutuhkan akuntabilitas baik

secara vertikal (kepada pemerintah atasan) maupun secara horizontal (kepada masyarakat di daerah) atas pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat (Taher, 2012).

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat terwujud jika entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara sistem pengendalian internal yang memadai (Aidil, 2010).

Kewajiban tentang penyelenggaraan sistem pengendalian internal di masing-masing entitas pelaporan dan akuntansi tersebut semakin dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 yang secara eksplisit mengatur apa yang dinamakan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang secara konsep banyak mengacu kepada definisi pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO).

Agar akuntabilitas dapat dilaksanakan diperlukan juga sebuah sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, adil, efektif, dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi (Lily, 2015).

Kebutuhan akan suatu sistem yang dapat mendukung terciptanya akuntabilitas diperkuat oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih bertanggungjawab, jujur, dan adil.

Selain dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang baik faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan secara relevan, andal, jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Hehanussa, 2015).

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenaiposisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitaspelaporan. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah.

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan laporan keuangan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pengguna laporan keuangan. Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas dapat dikatakan efektif apabila

informasi terkait dalam laporan keuangan tersebut mudah diakses oleh publik. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas (Fauziyah, 2017).

Pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur, baik itu melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan mudah diakses oleh publik maka akan berdampak terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebaliknya jika penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah (Fauziyah, 2017).

Namun pada era sekarang akuntabilitas pengelolaan keuangan baik pengelolaan keuangan negara maupun pengelolaan keuangan daerah masih jauh dari harapan. Dilihat dari hal penyajian laporan keuangan saja, masih banyak daerah yang mendapat opini WDP (wajar dengan pengecualian), TW (tidak wajar) dan bahkan TMP (tidak memberikan pendapat).

Salah satu daerah yang masih mendapat opini WDP dari BPK adalah Kabupaten Sijunjung. Pada Kabupaten Sijunjung BPK memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

yaitu wajar dengan pengecualian (WDP). BPK masih menemukan adanya kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah (BPK-RI, 2015). BPK masih menemukan adanya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Salah satu kasus yang terjadi yaitu Pemerintah Kabupaten Sijunjung menyajikan nilai aset tetap gedung bangunan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp629,27 miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp89,05 miliar tidak dapat ditelusuri keberadaannya karena kurangnya informasi berupa alamat/lokasi serta nama gedung bangunan yang dimaksud.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 2) Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 3) Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 4) Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 5) Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi hubungan antara penyajian laporan keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 6) Apakah sistem

pengendalian internal pemerintah memoderasi hubungan antara aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk memberikan bukti empiris apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2) Untuk memberikan bukti empiris apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3) Untuk memberikan bukti empiris apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 4) Untuk memberikan bukti empiris apakah sistem pengendalian internal pemerintah memberikan pengaruh terhadap hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 5) Untuk memberikan bukti empiris apakah sistem pengendalian internal pemerintah memberikan pengaruh terhadap hubungan antara penyajian laporan keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 6) Untuk memberikan bukti empiris apakah sistem pengendalian internal pemerintah memberikan pengaruh terhadap hubungan antara aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang

amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP No. 58 Tahun 2005).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah

tentang standar akuntansi pemerintahan.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan OPD yang ada dalam pemerintahan daerah. Sesuai dengan Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Pengertian aksesibilitas (*accessibility*) dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya.

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui atau memperoleh informasi atas laporan keuangan berdasarkan prinsip mudah dan biaya murah. Hal ini berarti pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas dan mudah atas laporan keuangan yang dihasilkannya.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008).

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Unsur sistem pengendalian internal pemerintah mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Hipotesis

H1: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H2: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H3: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H4: Sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H5: Sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi hubungan antara penyajian laporan keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H6: Sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi hubungan antara aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Kabupaten Sijunjung.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Sijunjung. Jumlah OPD yang terdapat di Kabupaten Sijunjung adalah sebanyak 34 OPD yang terdiri dari 1 Inspektorat, 2 Sekretariat, 18 Dinas, 4 Badan, 1 Kantor dan 8 Kecamatan (www.sijunjung.go.id).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan (Sugiyono, 2013: 122). Oleh karena itu dalam penelitian ini sampel yang diambil pada setiap OPD adalah kepala dinas dan semua kepala sub bagian yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 93 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Untuk instrumen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, total skor jawaban responden diperoleh sebesar 6595, dengan nilai minimal sebesar 1539, nilai maksimal sebesar 7695, rata-rata skor sebesar 4.29 dan standar deviasi sebesar 10.9.

Untuk instrumen sistem akuntansi keuangan daerah, total skor jawaban responden diperoleh sebesar 3032, dengan nilai minimal sebesar 729, nilai maksimal sebesar 3654, rata-rata skor sebesar 4.16 dan standar deviasi sebesar 5.48.

Untuk instrumen penyajian laporan keuangan daerah, total skor jawaban responden diperoleh sebesar 3864, dengan nilai minimal sebesar 891, nilai maksimal sebesar 4455, rata-rata skor sebesar 4.34 dan standar deviasi sebesar 5.76.

Untuk instrumen aksesibilitas laporan keuangan daerah, total skor jawaban responden diperoleh sebesar 693, dengan nilai minimal sebesar 162, nilai maksimal sebesar 810, rata-rata skor sebesar 4.28 dan standar deviasi sebesar 1.14.

Untuk instrumen sistem pengendalian internal pemerintah, total skor jawaban responden diperoleh sebesar 6057, dengan nilai minimal sebesar 1377, nilai maksimal sebesar 6885, rata-rata skor sebesar 4.40 dan standar deviasi sebesar 8.31.

Hasil Convergent Validity

Uji *Convergent Validity* dapat dilihat pada nilai loading atau AVE, apabila seluruh indikator konstruk menghasilkan nilai loading faktor > 0.70 , maka seluruh indikator

konstruk dikatakan valid atau jika nilai AVE yang dihasilkan > 0.50 , maka konstruk memenuhi persyaratan valid (Sarwono, 2014:19).

Tabel 1
Hasil Nilai AVE

Variabel	AVE
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.683
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0.710
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0.640
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	0.877
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.602

Sumber : Data Olahan (2018)

Hasil Validitas Discriminant

Discriminant validity dengan metode *Cross Loading* yaitu loading untuk masing-masing indikator diharapkan lebih tinggi dari *cross loading* indikator lainnya (Sarwono, 2014:20). Korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikatornya) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik dari konstruk lainnya dan direkomendasikan > 0.50 .

Hasil Uji Realibilitas

Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program *WarpPLS5.0* untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai *cronbach's alpha* dan *composite reability*.

Apabila nilai *cronbach's alpha* dan *composite reability* yang dihasilkan lebih dari 0.70

(*confirmatory research*) maka semua konstruk dapat dikatakan *reliable* (Sarwono, 2014:18).

Tabel 2

Hasil Nilai Cronbach's Alpha

Konstruk Penelitian	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.974
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0.948
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0.943
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	0.860
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.958

Sumber : *Data Olahan (2018)*

Dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* pada setiap konstruk memenuhi syarat diatas 0.70. Dengan keterangan nilai *cronbach's alphasistem* akuntansi keuangan daerah sebesar 0.948 > 0.70, penyajian laporan keuangan daerah sebesar 0.943 > 0.7, aksesibilitas laporan keuangan daerah sebesar 0.860 > 0.70, sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0.958 > 0.70 dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.974 > 0.70. Hal ini berarti seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi persyaratan reliabilitas.

Tabel 3

Hasil Nilai Composite Reability

Konstruk Penelitian	Composite Reability
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.976
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0.956
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0.951

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	0.935
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.962

Sumber : *Data Olahan (2018)*

Dapat dilihat bahwa nilai *composite reability* pada setiap konstruk memenuhi syarat diatas 0.70. Dengan keterangan nilai *composite reabilitysistem* akuntansi keuangan daerah sebesar 0.956 > 0.70, penyajian laporan keuangan daerah sebesar 0.951 > 0.70, aksesibilitas laporan keuangan daerah sebesar 0.935 > 0.70, sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0.962 > 0.70 dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.976 > 0.70. Hal ini berarti seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi persyaratan reabilitas.

Hasil Pengukuran Model Struktural

Model struktural (*inner model*) dinilai dengan melihat *R-Square* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Nilai *R-Square* sebesar 0.75 menunjukkan bahwa model kuat, nilai *R-Square* sebesar 0.5 menunjukkan bahwa model moderate dan nilai *R-Squares* sebesar 0.25 menunjukkan model lemah. Hasil *R-Square* dengan menggunakan program *WarpPLS 5.0* disajikan dalam tabel 4.21 dibawah ini.

Tabel 4

Hasil Nilai R-Square

Konstruk Penelitian	R-Square
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.592

Sumber : *Data Olahan (2018)*

Berdasarkan tabel diatas, nilai *R-square* untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 0.592. Artinya menunjukkan bahwa model moderate. Hasil ini menunjukkan bahwa 59.2% variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah sedangkan sisanya 40.8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis Pertama

Uji Hipotesis	Path Coefficients	P Value	Effect Size	Keterangan
SAKD ↓ APKD	0.557	<0.001	0.401	Berpengaruh

Sumber : Data Olahan (2018)

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hipotesis 1 memiliki *p-value* <0.001< 0.05 sehingga H_{a1} **diterima**. Dari hasil di atas diperoleh pengaruh langsung variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 56% dan signifikan dengan nilai $p = <0.001$.

Diterimanya H_{a1} menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan telah digunakan sesuai dengan fungsinya. Untuk menciptakan laporan keuangan yang

bermutu maka diperlukan pula suatu sistem yang dapat mendukung hal tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan maka akan meningkat pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Superdi (2017) yang menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis Kedua

Uji Hipotesis	Path Coefficients	P Value	Effect Size	Keterangan
PLKD ↓ APKD	0.045	0.343	0.004	Tidak Berpengaruh

Sumber : Data Olahan (2018)

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hipotesis 2 memiliki *p-value* 0.343 > 0.05 sehingga H_{a2} **ditolak**. Dari hasil di atas diperoleh pengaruh langsung variabel penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 5% dengan nilai $p = 0.343$.

Ditolaknya H_{a2} menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan masih belum dilakukan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pos-pos yang tidak diketahui

keberadaannya dalam laporan keuangan yang diaudit. Hal ini mengindikasikan bahwa penyajian laporan keuangan yang tidak dilakukan dengan benar maka akan berimplikasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2017) yang memberikan hasil bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 7

Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Uji Hipotesis	Path Coefficients	P Value	Effect Size	Keterangan
ALKD ↓ APKD	0.180	0.045	0.069	Berpengaruh

Sumber : Data Olahan (2018)

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hipotesis 3 memiliki *p-value* $0.045 < 0.05$ sehingga H_{a3} diterima. Dari hasil di atas diperoleh pengaruh langsung variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 18% dan signifikan dengan nilai $p = 0.045$.

Diterimanya H_{a3} menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan daerah maka semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sande (2013) yang memberikan hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 8

Hasil Uji Hipotesis Keempat

Uji Hipotesis	Path Coefficients	P Value	Effect Size	Keterangan
SAKD*SPIP ↓ APKD	-0.186	0.040	0.096	Memoderasi

Sumber : Data Olahan (2018)

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hipotesis 4 memiliki *p-value* $0.040 < 0.05$ sehingga H_{a4} diterima. Dari hasil di atas diperoleh pengaruh langsung variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan di moderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 19% dan signifikan dengan nilai $p = 0.040$.

Diterimanya H_{a4} menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan di moderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah maka sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Tanzerina (2017) yang memberikan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan di moderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis Kelima

Uji Hipotesis	Path Coefficients	P Value	Effect Size	Keterangan
PLKD*SPIP ↓ APKD	-0.058	0.299	0.016	Tidak Memoderasi

Sumber : Data Olahan (2018)

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa hipotesis 5 memiliki $p\text{-value } 0.299 > 0.05$ sehingga H_{a5} ditolak. Dari hasil di atas diperoleh pengaruh langsung variabel penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan di moderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 6% dan signifikan dengan nilai $p = 0.299$.

Ditolaknya H_{a5} menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan di moderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang baik belum menjamin penyajian laporan keuangan daerah akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Tanzerina (2017) yang memberikan hasil bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan di moderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis Keenam

Uji Hipotesis	Path Coefficients	P Value	Effect Size	Keterangan
ALKD*SPIP ↓ APKD	-0.034	0.378	0.006	Tidak Memoderasi

Sumber : Data Olahan (2018)

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa hipotesis 6 memiliki $p\text{-value } 0.378 > 0.05$ sehingga H_{a6} ditolak. Dari hasil di atas diperoleh pengaruh langsung variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan di moderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 3% dan signifikan dengan nilai $p = 0.378$.

Ditolaknya H_{a6} menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan di moderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang baik belum menjamin aksesibilitas laporan keuangan daerah akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2016) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak memoderasi hubungan antara pengawasan intern dengan akuntabilitas keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan di moderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan di moderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah.

6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan di moderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah.

Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran penulis yaitu:

1. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, untuk dapat menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara langsung agar data yang dihasilkan lebih akurat dan responden dapat memahami pertanyaan yang diajukan.
2. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat memperluas cakupan objek penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk daerah yang lebih luas.
3. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, hendaknya perlu menambahkan variabel independen lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang belum dimasukkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil, 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

- (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi), Thesis, Universitas Sumatra Utara Medan
- Fauziyah, Miftahul Reza, 2017. *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 6 Nomor 6 Juni 2017
- Hehanussa, Salomi J, 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*, ISSN 2302-9791, Vol. 2 No. 1 May 2015, 82-90
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Penerbit ANDI
- Lily, 2015. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)*, JOM FEKON, Vol.2 No.2 Oktober 2015, 1-15
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____, Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____, Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- _____, Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- _____, Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Puspitasari, Ni Made Dewi, 2016. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah, Pengawasan Intern, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Profesionalitas Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Buleleng)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, Vol. 5 No. 2 2016
- Sande, Peggy, 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*, ejournal, unp.ac.id

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta

Sumarsono, Hadi, 2009. *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.1. No 1. 2009

Taher, Kiki, 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan*

Daerah dan Kualifikasi Tenaga Akuntansi Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Skripsi, Universitas Widyatama

www.bpk.go.id

www.sijunjung.go.id